



Jurnal Ekspos

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus



Analisis Rendahnya Pilar Pasar Produk dan Sistem Keuangan dalam IDSD Kabupaten Kudus

Intan Khaeruli F^{1✉}, Amalia²

^{1,2} Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus

✉ lulifathilda25@gmail.com¹

Info Artikel

Riwayat:

Diterima :

Direvisi :

Disetujui :

Kata kunci:

Daya Saing Daerah,
IDSD, Pasar Produk,
Sistem Keuangan.

Keywords:

Financial System,
Product Markets,
Regional
Competitiveness,
Regional
Competitiveness Index
(IDSD).

Abstrak

Kabupaten Kudus pada tahun 2025 mencatat nilai IDSD sebesar 3,61, namun menunjukkan ketimpangan antar pilar, khususnya pada Pilar 7 (Pasar Produk) dan Pilar 9 (Sistem Keuangan). Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor struktural penyebab rendahnya capaian kedua pilar tersebut. Pendekatan deskriptif digunakan dengan memanfaatkan data sekunder IDSD dan PDRB Kabupaten Kudus. Analisis indikator IDSD dipadukan dengan interpretasi struktur ekonomi daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dominasi sektor industri manufaktur, lemahnya sektor jasa, serta belum berkembangnya ekonomi kreatif menurunkan tingkat persaingan pasar. Selain itu, keterbatasan akses pembiayaan, rendahnya pemanfaatan KUR, serta minimnya literasi keuangan dan asuransi memperlemah sistem keuangan daerah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sektor jasa, digitalisasi UMKM, dan peningkatan inklusi keuangan untuk memperkuat daya saing daerah secara berkelanjutan.

Abstract

Kudus Regency recorded an IDSD score of 3.61; however, disparities across pillars remain evident, particularly in Pillar 7 (Product Market) and Pillar 9 (Financial System). This study aims to analyze the structural factors underlying the low performance of these two pillars. A descriptive approach is applied using secondary data from the IDSD and Gross Regional Domestic Product (GRDP) of Kudus Regency. The analysis combines an assessment of IDSD indicators with an interpretation of the regional economic structure. The findings indicate that the dominance of the manufacturing sector, the weak development of the service sector, and the limited growth of the creative economy reduce market competition. In addition, constrained access to financing, suboptimal utilization of the People's Business Credit (KUR), and low levels of financial and insurance literacy weaken the regional financial system. This study recommends strengthening the service sector, accelerating MSME digitalization, and enhancing financial inclusion to improve regional competitiveness sustainably.

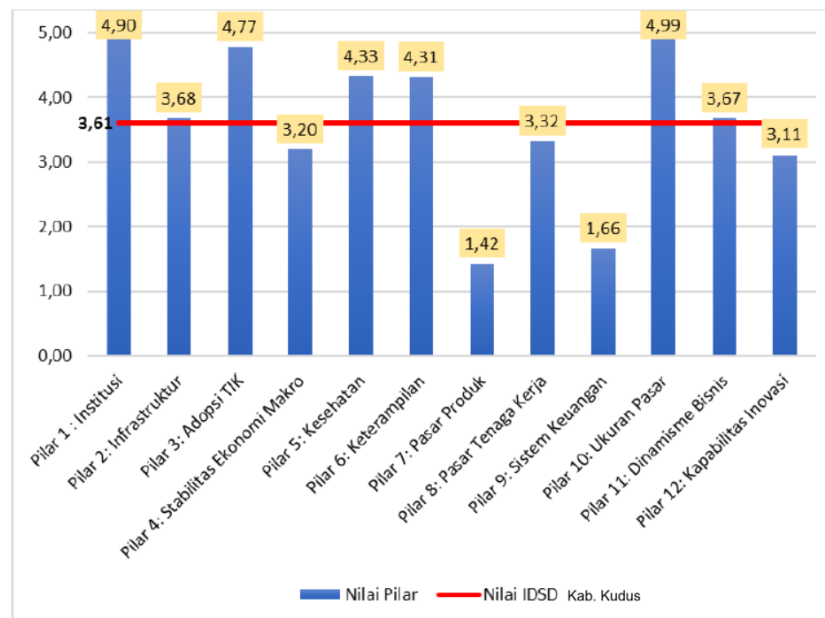
ISSN 3110-570X (Print)

ISSN 3110-4932 (Online)

PENDAHULUAN

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran komprehensif yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu daerah dalam menciptakan produktivitas, efisiensi, dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan. Instrumen ini dibangun atas empat komponen utama yaitu: lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Selanjutnya, empat komponen utama tersebut dirinci ke dalam dua belas pilar pengukuran yang objektif dan dapat dibandingkan antar daerah. IDSD di Indonesia disusun oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan kerangka yang mengadopsi prinsip *Global Competitiveness Index* (GCI), sehingga mampu memberikan indikasi daya saing daerah secara lebih sistematis dan terukur dalam konteks nasional maupun global (BRIN, 2024 & Schwab, 2020).

Kabupaten Kudus pada tahun 2025 berhasil mencapai skor IDSD sebesar 3,61 yang menunjukkan bahwa secara umum daya saing daerah berada di atas rata-rata nasional (BRIN, 2025; Bappenas, 2021). Namun, capaian agregat tersebut menunjukkan terdapat dua pilar dalam komponen pasar yang memiliki skor paling rendah, yaitu Pilar 7 (Pasar Produk) dan Pilar 9 (Sistem Keuangan). Rendahnya skor pada kedua pilar tersebut mengindikasikan adanya permasalahan efisiensi pasar serta keterbatasan akses sistem keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi ini berpotensi memperlambat perluasan peluang usaha, inklusi keuangan, dan kemampuan daerah dalam menarik investasi, sebagaimana juga ditegaskan dalam kajian pembangunan ekonomi daerah berbasis daya saing (OECD, 2021; World Bank, 2021).



Gambar 1. Grafik Nilai IDSD Tiap Pilar

Sumber: BRIN, 2025

Permasalahan rendahnya nilai Pilar 7 dan Pilar 9 dipahami sebagai cerminan kondisi ekonomi Kabupaten Kudus yang masih didominasi oleh sektor industri manufaktur, sementara sektor jasa, UMKM, dan ekonomi kreatif belum berkembang secara optimal. Kesenjangan struktur ekonomi ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi daerah belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk menciptakan pasar yang kompetitif dan inklusif serta sistem keuangan yang responsif terhadap kebutuhan pembiayaan pelaku usaha lokal. Temuan ini sejalan dengan literatur daya saing regional yang menekankan bahwa efisiensi pasar dan akses sistem keuangan merupakan faktor kunci dalam memperkuat daya saing wilayah secara berkelanjutan (Porter, 2020; UNCTAD, 2022; OECD, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab rendahnya skor kedua pilar tersebut serta perlunya arah strategi peningkatan yang kontekstual dengan karakteristik lokal Kabupaten Kudus. Pendekatan semacam ini dilakukan untuk memperkuat basis empiris perumusan kebijakan pembangunan ekonomi daerah berbasis data IDSD, sekaligus memberikan rekomendasi yang relevan untuk penguatan sektor jasa, UMKM, inovasi pasar produk, dan inklusi keuangan, yang selama ini

masih belum maksimal termanfaatkan meskipun memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan inklusif (World Bank, 2021; Asian Development Bank, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kondisi daya saing daerah Kabupaten Kudus, khususnya pada Pilar Pasar Produk (Pilar 7) dan Pilar Sistem Keuangan (Pilar 9) dalam Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Pendekatan deskriptif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan menguji hipotesis, melainkan mengidentifikasi permasalahan, menjelaskan kondisi faktual, serta memahami keterkaitan antar indikator daya saing daerah (OECD, 2021).

Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder, yang berasal dari laporan resmi IDSD yang diterbitkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) 2025 serta data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kudus. Teknik analisis dilakukan melalui analisis indikator IDSD, khususnya indikator penyusun Pilar 7 dan Pilar 9, untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab rendahnya nilai kedua pilar tersebut. Selanjutnya, hasil analisis indikator diinterpretasikan dengan struktur ekonomi daerah, terutama komposisi sektor usaha dan kontribusinya terhadap PDRB, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi pasar produk dan sistem keuangan di Kabupaten Kudus (BRIN, 2025; BPS Kabupaten Kudus, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN:

1. Pilar 7 (Pasar Produk)

Hasil analisis IDSD menunjukkan bahwa Pilar 7 (Pasar Produk) Kabupaten Kudus memperoleh nilai terendah, khususnya pada indikator persaingan sektor jasa yang hanya mencapai 1,42. Rendahnya nilai ini mencerminkan bahwa pasar jasa di Kabupaten Kudus belum berkembang secara kompetitif. Struktur ekonomi daerah yang masih didominasi oleh sektor industri manufaktur menyebabkan sektor jasa kurang mendapatkan ruang tumbuh yang memadai. Kondisi ini diperkuat oleh nilai *Location Quotient* (LQ) sektor jasa yang hanya sebesar 0,45, menunjukkan bahwa sektor jasa bukan merupakan sektor basis dan kontribusinya terhadap perekonomian daerah relatif lemah (BRIN, 2025; BPS Kabupaten Kudus, 2024).

Dominasi sektor industri juga berdampak pada belum berkembangnya ekosistem ekonomi kreatif di Kabupaten Kudus. Kontribusi sektor jasa terhadap PDRB tercatat hanya 4,29%, menandakan rendahnya diversifikasi ekonomi daerah. Keterbatasan jumlah pelaku usaha jasa, rendahnya inovasi produk dan layanan, serta belum terbentuknya *creative ecosystem* yang terintegrasi menjadi faktor penghambat utama dalam meningkatkan persaingan pasar produk. Kondisi ini menunjukkan bahwa rendahnya nilai Pilar 7 tidak semata disebabkan oleh lemahnya aktivitas pasar, tetapi juga oleh ketimpangan struktur ekonomi yang belum mendorong sektor jasa dan ekonomi kreatif sebagai penopang baru daya saing daerah (Porter, 2020; UNCTAD, 2022).

2. Pilar 9 (Sistem Keuangan)

Pilar 9 (Sistem Keuangan) Kabupaten Kudus juga berada pada kategori rendah, yang tercermin dari rasio kredit swasta terhadap PDRB sebesar 2,69. Nilai ini menunjukkan bahwa peran sektor keuangan formal dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah masih terbatas, khususnya bagi UMKM. Kondisi ini sejalan dengan temuan BRIN (2025) yang menunjukkan masih adanya kendala administratif, keterbatasan agunan, serta rendahnya kapasitas pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan formal (BRIN, 2025; Bank Indonesia, 2021).

Selain itu, indikator nilai akad Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang hanya mencapai 1,82 menunjukkan bahwa program KUR belum dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku UMKM di Kabupaten Kudus. Meskipun KUR dirancang sebagai instrumen pembiayaan inklusif, realisasinya masih terkendala oleh rendahnya literasi keuangan, minimnya pendampingan usaha, serta keterbatasan informasi terkait skema pembiayaan yang tersedia. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya premi asuransi terhadap PDRB yang hanya sebesar 0,46, yang mencerminkan masih rendahnya kesadaran dan literasi masyarakat terhadap pentingnya perlindungan usaha dan risiko keuangan. Temuan ini konsisten dengan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyebutkan bahwa rendahnya literasi

keuangan dan asuransi menjadi salah satu hambatan utama penguatan sistem keuangan daerah (OJK, 2022; OJK, 2024; World Bank, 2021). Berdasarkan laporan akhir analisis IDSD Kabupaten Kudus, rendahnya penetrasi asuransi dan pembiayaan alternatif juga menunjukkan bahwa sistem keuangan daerah belum sepenuhnya inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan pelaku usaha. Dengan demikian, rendahnya nilai Pilar 9 tidak hanya mencerminkan keterbatasan akses kredit, tetapi juga menunjukkan lemahnya ekosistem literasi keuangan dan perlindungan risiko yang seharusnya mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Hubungan Pilar Pasar Produk dan Sistem Keuangan terhadap Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Kudus

Rendahnya capaian Pilar 7 (Pasar Produk) dan Pilar 9 (Sistem Keuangan) dalam IDSD Kabupaten Kudus menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara struktur ekonomi makro daerah dengan kinerja pasar dan sistem pembiayaan. Ketimpangan ini memperkuat siklus lemahnya pasar produk dan sistem keuangan, yang pada akhirnya menghambat diversifikasi ekonomi dan pertumbuhan inklusif daerah (OECD, 2021; World Bank, 2021). Struktur ekonomi Kabupaten Kudus masih didominasi oleh sektor industri pengolahan/manufaktur, yang tercermin dari kontribusi sektor tersebut terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sebaliknya, sektor jasa memiliki kontribusi yang relatif kecil, yaitu hanya sekitar 4,29% terhadap PDRB, serta nilai *Location Quotient* (LQ) sektor jasa sebesar 0,45, yang menandakan bahwa sektor jasa bukan merupakan sektor basis ekonomi daerah. Kondisi ini berdampak langsung pada rendahnya persaingan pasar produk, khususnya pada sektor jasa, sebagaimana tercermin pada rendahnya nilai Pilar 7.

Ketimpangan struktur ekonomi tersebut juga berimplikasi pada kinerja sistem keuangan daerah. Dominasi sektor industri besar cenderung membuat aktivitas pembiayaan terpusat pada pelaku usaha berskala menengah dan besar, sementara UMKM dan sektor jasa kurang terakomodasi dalam sistem keuangan formal. Hal ini tercermin dari rendahnya rasio kredit swasta terhadap PDRB (2,69) serta belum optimalnya pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Keterbatasan akses pembiayaan ini memperlemah kemampuan pelaku usaha jasa dan UMKM untuk melakukan ekspansi, inovasi, dan peningkatan kualitas produk, sehingga memperkuat siklus lemahnya pasar produk. Dengan demikian, rendahnya Pilar 7 dan Pilar 9 saling berkaitan secara struktural dan membentuk lingkaran yang menghambat diversifikasi ekonomi serta pertumbuhan inklusif di Kabupaten Kudus.

Lebih lanjut, rendahnya premi asuransi terhadap PDRB (0,46) menunjukkan bahwa perlindungan risiko usaha dan literasi keuangan masyarakat masih rendah. Kondisi ini memperkuat kerentanan ekonomi daerah, terutama pada sektor non-industri yang seharusnya menjadi penopang baru pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan laporan akhir analisis IDSD Kabupaten Kudus, lemahnya literasi keuangan dan rendahnya penetrasi layanan keuangan formal memperlambat penguatan sektor jasa dan UMKM sebagai bagian dari transformasi ekonomi daerah. Oleh karena itu, perbaikan Pilar 7 dan Pilar 9 sebagai upaya untuk menyeimbangkan struktur ekonomi makro Kabupaten Kudus melalui penguatan sektor jasa, peningkatan akses pembiayaan, serta pengembangan sistem keuangan yang lebih inklusif.

Tabel 1. Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Kudus dan IDSD

Aspek Ekonomi Makro	Kondisi Kab. Kudus	Keterangan
Struktur ekonomi	Dominan sektor industri	Bergantung pada industri dan sektor jasa kurang berkembang
Sektro jasa ke PDRB	± 4,29%	Kontribusi sektor jasa rendah pada perekonomian daerah
LQ sektor jasa	0,45 (non-basis)	Sektor jasa buan sektor unggulan daerah
Persaingan sektor jasa	1,42	Indikator Pilar 7 Pasar Produk indikasi rendahnya persaingan jasa
Kredit swasta ke PDRB	2,69	Indikator Pilar 9 Sistem Keuangan, indikasi rendahnya peran pembiayaan formal
Nilai akad KUR	1,82	Indikator Pilar 9 Sistem Keuangan, indikasi akses KUR belum optimal
Premi asuransi	0,46	Indikator Pilar 9 Sistem Keuangan, indikasi literasi keuangan dan asuransi rendah

Capaian IDSD Kabupaten Kudus yang relatif baik. Namun, ketimpangan antar pilar menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi ekonomi dan pemanfaatannya. Arah pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Kudus yang menekankan penguatan UMKM, diversifikasi ekonomi, dan peningkatan layanan ekonomi daerah memberikan landasan kebijakan yang kuat untuk perbaikan Pilar 7 dan Pilar 9 secara terintegrasi (Pemerintah Kabupaten Kudus, 2021).

Implikasi kebijakan dari keselarasan IDSD dan RPJMD tersebut dapat diterjemahkan ke dalam aksi nyata, antara lain melalui pengembangan sektor jasa dan ekonomi kreatif sebagai bagian dari transformasi struktur ekonomi daerah, pelaksanaan program digitalisasi UMKM jasa, serta pembentukan kawasan pusat jasa yang mendukung aktivitas ekonomi lokal (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023). Pada Pilar 9, arah RPJMD yang menekankan pemberdayaan UMKM dan peningkatan akses pembiayaan dapat diimplementasikan melalui optimalisasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR), peningkatan literasi keuangan dan asuransi, serta penguatan koperasi modern dan kemitraan dengan lembaga keuangan dan *fintech* berizin. Dengan demikian, kebijakan yang dirumuskan tidak hanya selaras dengan dokumen perencanaan daerah, tetapi juga secara langsung menargetkan peningkatan nilai Pilar 7 dan Pilar 9 IDSD sebagai bagian dari strategi peningkatan daya saing Kabupaten Kudus yang inklusif dan berkelanjutan.

4. Skema peningkatan pasar produk dan sistem keuangan

Pilar 7 (Pasar Produk) dan Pilar 9 (Sistem Keuangan) dirancang untuk memperkuat fondasi daya saing Kabupaten Kudus dengan mendorong pertumbuhan sektor jasa, memperluas akses pembiayaan, serta meningkatkan efisiensi pasar secara menyeluruh. Pada Pilar 7, strategi diarahkan untuk menciptakan lingkungan usaha yang lebih kompetitif melalui:

- a. Pengembangan ekonomi kreatif: membentuk *Creative Hub* dan pelatihannya serta adanya inkubasi bisnis untuk startup kreatif
- b. Digitalisasi UMKM jasa: Pelatihan digital marketing untuk UMKM jasa bersama Disdag, Diskominfo, atau perbankan.
- c. Pembentukan kawasan pusat jasa yang diperkuat juga brandingnya.
- d. penyelenggaraan event dan pameran yang mampu meningkatkan *exposure* dan persaingan usaha lokal.

Sementara itu, penguatan Pilar 9 difokuskan pada perluasan akses kredit dan KUR melalui:

- a. Kemudahan KUR bagi Masyarakat maupun UMKM dengan penawaran yang menarik atau menyederhanakan persyaratan administrasi melalui kerja sama Pemda dan bank penyalur.
- b. Peningkatan literasi keuangan dan asuransi bagi masyarakat dan UMKM, berupa pelatihan rutin bersama OJK, perbankan, dan perusahaan asuransi.
- c. Pengembangan alternatif pembiayaan seperti koperasi modern dan kerja sama dengan *fintech* berizin OJK.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan rendahnya Pilar 7 (Pasar Produk) dan Pilar 9 (Sistem Keuangan) dalam IDSD. Pilar 7 melemah karena persaingan usaha jasa yang rendah, minimnya inovasi, belum berkembangnya ekonomi kreatif, serta ketergantungan ekonomi yang masih dominan pada industri manufaktur. Sementara itu, rendahnya nilai Pilar 9 disebabkan oleh rendahnya penyerapan kredit swasta, belum optimalnya pemanfaatan KUR, serta rendahnya penetrasi asuransi akibat literasi keuangan yang masih terbatas. Upaya perbaikan kedua pilar memerlukan intervensi terintegrasi melalui pengembangan sektor jasa, digitalisasi UMKM, pembentukan kawasan pusat jasa, serta penguatan event ekonomi kreatif sebagai pendorong pertumbuhan pasar lokal. Pada saat yang sama, peningkatan sistem keuangan perlu dilakukan melalui kemudahan akses KUR, peningkatan literasi keuangan dan asuransi, serta pengembangan alternatif pembiayaan seperti koperasi modern dan kemitraan *fintech* berizin OJK. Kolaborasi lintas OPD dan instansi terkait menjadi kunci agar strategi tersebut dapat berjalan efektif dan menghasilkan perbaikan nilai pada siklus penilaian IDSD berikutnya. Dengan implementasi yang konsisten, Kabupaten Kudus berpotensi memperkuat daya saingnya secara lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asian Development Bank. (2021). *MSME development and market competitiveness*. ADB.
- Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2024). *Indeks Daya Saing Daerah Indonesia 2024*. BRIN.
- Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2025). *Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Kudus 2025*. BRIN.
- Bank Indonesia. (2021). *Penguatan pembiayaan UMKM dan inklusi keuangan*. BI Institute.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2023). *Peta jalan pengembangan UMKM nasional*. Kemenkop UKM.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2021). *Transformasi Struktur Ekonomi Indonesia*. Bappenas.
- OECD. (2021). *Regional development and competitiveness*. OECD Publishing.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia*. OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Laporan perkembangan inklusi keuangan daerah*. OJK.
- Pemerintah Kabupaten Kudus. (2021). *RPJMD Kabupaten Kudus 2021–2026*. Pemkab Kudus.
- Porter, M. E. (2020). *The competitive advantage of regions*. Harvard Business Review.
- Schwab, K. (2020). *The Global Competitiveness Report*. World Economic Forum.
- UNCTAD. (2022). *Creative Economy Outlook*. United Nations.
- World Bank. (2020). *Subnational competitiveness and productivity*. World Bank Publications.
- World Bank. (2021). *Financial inclusion and regional growth*. World Bank Group.